

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

INDAH PERMATA SARI
NIM: 2010/56549

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SOLOK**

NAMA : INDAH PERMATA SARI

BP/NIM : 2010 / 56549

KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

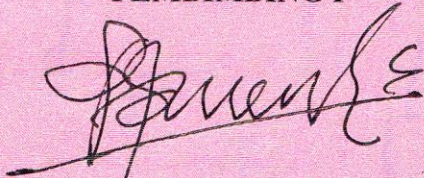
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Juli 2015

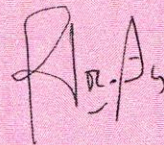
Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP.19621105 198703 1 002

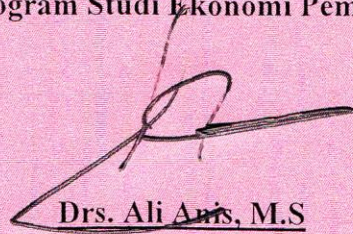
PEMBIMBING II



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S
NIP.19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK

Nama : Indah Permata Sari

BP/ NIM : 2010/56549

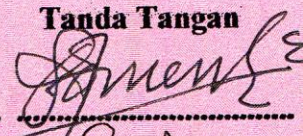
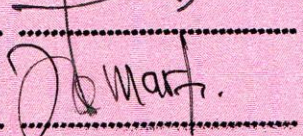
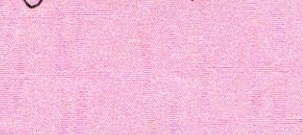
Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2015

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Akhirmen, M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Melti Roza Adry, SE., ME	2. 
3. Anggota	: Novya Zulva Riani, SE., M.Si	3. 
4. Anggota	: Joan Marta, SE., M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari
Nim/ Tahun Masuk : 56549/2010
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 25 Januari 1992
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Aur No. 9 Ujung Gurun, Padang
No. HP/telp. : 082283224155
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Solok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku, serta sanksinya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2015
Yang Menyatakan



Indah Permata Sari
NIM/BP. 56549/2010

ABSTRAK

INDAH PERMATA SARI. 56549/2010: Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah Antar Wilayah di Kabupaten Solok. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (2) Perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (3) Perbedaan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (4) Perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan dan menerangkan penelitian dengan menggunakan data-data berbentuk angka-angka yang diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung menggunakan rumus yang relevan. Variabel dalam penelitian ini adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya manusia, kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dari tahun 1994-2012. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Uji t-Test pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana ($t_{hitung} = 0,638 < \text{dari nilai } t_{tabel} = 2,1604$) dengan sig $0,534 > \alpha = 0.05$. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana ($t_{hitung} = 6,261 > \text{dari nilai } t_{tabel} = 2,1009$) dengan sig $0,000 < \alpha = 0.05$ (3) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana ($t_{hitung} = -6,680 > \text{dari } t_{tabel} .2,2010$) dengan sig $0,000 < \alpha = 0.05$ (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana ($t_{hitung} = 1,387 < t_{tabel} = 2,1098$) dengan sig $0,183 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) Untuk pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan pemekaran dan proses pemekaran tetapi juga sebuah kebijakan yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat (2) memberikan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat untuk menentukan pemekaran atas dasar informasi yang lebih baik.

Kata kunci: *tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya manusia, kemampuan keuangan daerah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Solok”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
3. Bapak/Ibu penguji skripsi yaitu Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, Ibu Melti Roza Adry, SE.ME, Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si dan Bapak Joan Marta, SE, M.Si yang telah menguji skripsi ini.

4. Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta dan Ayahanda dan juga kepada saudari-saudari saya, kak uti, kak dewi, mimi, dan Nabila yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2010 dan teristimewa kepada Ilham David yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Pemekaran dan Otonomi Daerah	15
2. Kemiskinan	21
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	24
4. Indeks Pembangunan Manusia.....	28
5. Kemampuan Keuangan Daerah.....	31
6. Temuan Penelitian Terdahulu	35
B. Kerangka Konseptual.....	38
C. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41

C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Definisi Operasional	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
1. Analisis Deskriptif	45
2. Analisis Induktif	46
a. Uji Normalitas Sebaran Data.....	46
b. Uji Homogenitas Varians	46
c. Uji t.....	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Solok	50
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	51
3. Analisis Induktif.....	63
B. Pembahasan.....	73
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1996 – 2003.....	8
Tabel 1.2	PDRB Berdasarkan Harga Konstan (Jutaan Rupiah) di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1993-2003.....	9
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1996-2002	10
Tabel 1.4	Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1994-2003	11
Tabel 2.1	Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah.....	35
Tabel 4.1	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1996-2003.....	51
Tabel 4.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Solok Setelah Pemekaran Tahun 2004-2012.....	52
Tabel 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1993-2003.....	55
Tabel 4.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Setelah Pemekaran Tahun 2004-2012.....	56
Tabel 4.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1996-2003.....	58
Tabel 4.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Setelah Pemekaran Tahun 2004-2012	59
Tabel 4.7	Perkembangan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1994-2003.....	60
Tabel 4.8	Perkembangan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok Setelah Pemekaran Tahun 2004-2012	61
Tabel 4.9	Uji Normalitas Tingkat Kemiskinan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1996-2012	63

Tabel 4.10 Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1993-2012	64
Tabel 4.11 Uji Normalitas IPM Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1996-2012	65
Tabel 4.12 Uji Normalitas IKK Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1994-2012	66
Tabel 4.13 Uji t Tingkat Kemiskinan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1996-2012.....	70
Tabel 4.14 Uji t Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1993-2012.....	71
Tabel 4.15 Uji t IPM Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1996-2012.....	72
Tabel 4.16 Uji t IKK Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 1996-2012.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Analisi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Solok	39
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Uji Normalitas Data dan Uji t.....	86
Lampiran 2. Tabel t.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia mengalami perubahan kondisi yang sangat penting sekaligus mempengaruhi pola pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan. Dengan berlakunya UU No 22 tahun 1999, sistem pemerintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat, tetapi terdapat pemberlakuan asas desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu implementasi dari bentuk desentralisasi di Indonesia adalah praktek pemekaran wilayah, dimana pemerintah daerah dapat dibagi menjadi dua pemerintah daerah baru atau lebih untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut dan melahirkan pemerintah daerah yang efektif, serta membuat pemimpin politik lokal menjadi lebih dekat dengan pemilihnya.

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi

satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu Kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Di era otonomi daerah ini, aspirasi untuk melakukan pemekaran wilayah merupakan salah satu tuntutan yang tidak dapat dipungkiri. Berbagai argumen yang mendukung adanya pemekaran wilayah antara lain untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sjafrizal, 2008 (dalam Sandra Kurniawati, 2012) menyatakan bahwa secara formal motivasi suatu daerah memekarkan diri adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi, seringkali motivasi pemekaran daerah juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Salah satu faktor pendorong mengapa pemerintah lokal melihat kesempatan besar dengan adanya pemekaran daerah adalah secara materil, dengan adanya pembentukan kabupaten dan provinsi

baru maka daerah-daerah tersebut akan menerima suntikan dana pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Alasan mendasar terjadi pemekaran daerah juga disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang mendominasi oleh etnis tertentu sering kali dijadikan alasan.

Dalam aspek pengembangan wilayah, pelaksanaan pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah induk dan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan sumber daya yang digunakan dalam proses pembangunan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran daerah. Adakalanya, pemekaran daerah menyebabkan kegiatan perekonomian daerah induk menurun drastis karena sebagian potensi daerahnya berada di daerah otonom baru (Sjafrizal, 2008). Sebaliknya, sering pula pengembangan wilayah daerah otonom baru terhambat karena keterbatasan sumber daya pembangunan, baik dari segi dana, potensi daerah, maupun sumber daya manusia. Sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah induk dan daerah otonom baru sehingga ketimpangan ini akan berpengaruh juga terhadap kemiskinan antar wilayah baru otonom dan wilayah induk.

Jadi pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih objektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Menurut Sjafrizal (2008:266) faktor pemicu pemekaran dianalisis menggunakan 4 variabel utama:

1. Perbedaan agama

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.

2. Perbedaan etnis dan budaya

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar

daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson.

4. Luas daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakuk94ean pemekaran daerah.

Menurut Sjafrizal (2008:276) analisa terhadap beberapa faktor penting yang menentukan tingkat kelayakan pemekaran daerah terutama dalam segi ekonomi dan keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Alasannya jelas karena pemekaran suatu daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik bila kemampuan keuangan daerah bersangkutan tidak memadai, paling kurang untuk membiayai tugas-tugas pokok pemerintahan, yaitu menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pelayanan publik.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Alasannya adalah bahwa bila pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan masih rendah, maka pemekaran dikhawatirkan justru akan menyebabkan semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

3. Kualitas Sumberdaya Manusia

Alasannya adalah karena bila kualitas sumberdaya manusia daerah bersangkutan masih rendah, maka pemekaran daerah tersebut bisa berakibat kurang lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah bersangkutan. Bahkan, kualitas sumberdaya yang masih rendah dapat pula menyebabkan proses pembangunan di daerah pemekaran akan sulit berkembang.

Sumatera Barat memiliki beberapa daerah pemekaran. Pada tahun 1999 Kabupaten Padang Pariaman mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2002 Kabupaten Padang Pariaman kembali mengalami pemekaran menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Lalu, pada akhir tahun 2003, ada tiga wilayah yang dimekarkan di

Sumatera Barat yaitu : (1) Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya (2) Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (3) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Solok mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003. Sebelum pemekaran, Kabupaten Solok mempunyai luas sekitar $\pm 7.084,2 \text{ Km}^2$. Karena pemekaran tersebut, menjadikan luas wilayah Kabupaten induk (Kabupaten Solok) berkurang menjadi 3.738 Km^2 . Pemekaran juga berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 403 Jorong

Mengacu pada UU No. 38 tahun 2003 bahwa pembentukan kabupaten tersebut akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Yusran (2007) berdasarkan pengamatan lapangan memperlihatkan keempat Kabupaten yang melakukan pemekaran tersebut salah satunya Kabupaten Solok menemukan kendala berupa kekurangan Sumber Daya Alam (SDA), mengeluhkan terbatasnya ketersediaan kualitas sumber daya manusianya, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dari keseluruhan wilayah yang dimekarkan di Sumatera Barat, Kabupaten Solok merupakan daerah yang memiliki peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahunnya dibandingkan dengan daerah

pemekaran lainnya. Oleh karena itu maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Solok. Kemiskinan merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pemekaran, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1996 - 2003

Tahun	Tingkat Kemiskinan
1996	9,47
1999	10,26
2000	15,86
2001	20,74
2002	15,51
2003	15,76

Sumber : BPS Sumatera Barat Data Diolah

Tabel 1.1 menjelaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003. Sebelum pemekaran di tahun 1996-2001 tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 1996 tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok adalah sebesar 9,47%, dan di tahun 2001 meningkat menjadi 20,74%. Kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 1996 sampai dengan tahun 2003. Selanjutnya di tahun 2002 tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok menurun menjadi 15,51%. Selanjutnya di tahun 2003 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 15,76%. Jumlah tingkat kemiskinan yang terus meningkat inilah yang menjadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran pada akhir tahun 2003 di Kabupaten Solok.

Salah satu faktor pemicu terjadinya pemekaran selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dari angka PDRB menurut harga konstan, yang akan di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 : PDRB per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Solok Sebelum Pemekaran Tahun 1993-2003 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB
1993	969640,17
1994	1033103,90
1995	1123069,81
1996	1210683,81
1997	1269199,29
1998	1221757,58
1999	1240302,62
2000	1212853,67
2002	1372365,25
2003	1439146,44

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tabel 1.2 menjelaskan PDRB per kapita menurut harga konstan sebelum terjadinya pemekaran di Kabupaten Solok dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003. Sebelum dilakukannya pemekaran yakni dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 1998 PDRB mengalami penurunan menjadi 1221757,58. Hal ini disebabkan pada pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 1998, aktivitas perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor formal, terhambat karena adanya krisis. Dampaknya, banyak perusahaan besar tutup, dan hal tersebut tentu saja berimplikasi pada turunnya produktivitas perekonomian di

Indonesia dikarenakan berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa di Indonesia termasuk Kabupaten Solok.

Pada tahun 2000 PDRB mengalami penurunan menjadi 1212853,67. Selanjutnya tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan. Selanjutnya faktor pemicu terjadinya pemekaran daerah adalah kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran:

Tabel 1.3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1996-2002

Tahun	IPM
1996	64,00
1999	61,60
2002	63,70

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tabel 1.3 menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok sebelum pemekaran yaitu tahun 1996-2002. Sebelum tahun 2004 keatas IPM diukur sekali tiga tahun, yaitu dari tahun 1996, 1999, dan tahun 2002. Pada tahun 1996 sampai dengan 1999 kualitas SDM di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 64,00% menjadi 61,60%. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin yang meningkat dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 seperti yang dijelaskan pada tabel 1.2 di atas. Karena banyaknya penduduk miskin yang tidak sanggup membiayai anaknya untuk sekolah, anak-anak tersebut lebih memilih untuk membantu orang tuanya berladang atau bertani dibandingkan dengan bersekolah. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya kualitas SDM dari tahun 1996 sampai dengan

tahun 1999 di Kabupaten Solok. Selanjutnya pada tahun 2002 IPM di Kabupaten Solok mengalami peningkatan menjadi 63,70%. Berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 inilah yang menyebabkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Solok.

Faktor pemicu terjadinya pemekaran selanjutnya adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran:

Tabel 1.4 : Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok (Persen) Sebelum Pemekaran Tahun 1994-2003

Tahun	IKK
1994	0,648
1995	0,224
1996	0,407
1997	0,448
1998	0,445
1999	0,436
2000	0,299
2001	0,686
2002	0,444
2003	0,584

Sumber : BPS Sumatera Barat Data Diolah

Tabel 1.4 menjelaskan data Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok sebelum pemekaran dari tahun 1994-2003. Kriteria tingkat kemampuan keuangan menurut Bappenas tahun 2003 adalah jika Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah 0,00 – 0,33 itu termasuk dalam

klasifikasi rendah, sedangkan 0,34 – 0,43 itu termasuk dalam klasifikasi sedang dan 0,44 – 1,00 itu termasuk dalam klasifikasi tinggi.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Kabupaten Solok berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2000 dan 2001 IKK di Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 0,299 di tahun 2000 dan 0,686 di tahun 2001, ini termasuk dalam klasifikasi tinggi. Hal ini akan memperkuat ketahanan keuangan di Kabupaten Solok dalam menghadapi krisis yang dapat terjadi di luar prediksi. Selanjutnya pada tahun 2002 IKK Kabupaten Solok mengalami penurunan yaitu menjadi 0,444 ini termasuk dalam klasifikasi tinggi menurut kriteria IKK daerah.

Dari penjelasan tabel diatas maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **”Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah Antar Wilayah di Kabupaten Solok”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang berhubungan dengan Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah Antar Wilayah di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kemiskinan di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran?

2. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran?
3. Apakah terdapat perbedaan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran?
4. Apakah terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Perbedaan kemiskinan di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.
2. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.
3. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.
4. Perbedaan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi regional, ekonomi perkotaan dan perdesaan, perencanaan pembangunan ekonomi.
3. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Pengambil kebijakan, yaitu Departemen dalam negeri, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
4. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya manusia, dan kemampuan keuangan sebelum dan setelah dilakukannya pemekaran.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pemekaran dan Otonomi Daerah

Menurut *Encyclopedia of Sosial Science* (dalam Sjafrizal, 2008:229) pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of sosial body and its actual independence*. Dengan demikian pengertian otonomi menyangkut 2 hal pokok yaitu, kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintah pemerintah sendiri (*self goverment*). Berdasarkan hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai suatu daerah otonom. Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralisasi, sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktivitas pembangunan di seluruh

daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah bersangkutan serta aspirasi serta keinginan masyarakat setempat (dalam Sjafrizal 2012:272).

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut, menurut Hidayat Syarief, 2000 (dalam Sjafrizal 2014:106). *Pertama*, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokrasi dalam pengelolaan negara. *Kedua*, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting halnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. *Ketiga*, adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masala-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat di daerah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada

Kabupaten /kota dan desa serta dari pemerintah Kabupaten /kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terelenggaranya otonomi daerah”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonomi baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah Kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor-faktor tersebut antara lain : (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah, (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Jadi, daerah yang melakukan otonomi bisa dikatakan harus bisa mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak ada campur tangan lagi dari daerah induk. Setelah melakukan otonomi, daerah baru ataupun daerah induk harus mampu mengatur organisasinya, sendiri, mengatur dan mengurus rumah tangganya oleh aparatur pemerintah masing-masing, membiayai semua kegiatan pemerintahan dengan keuangan dan kemampuan daerah masing-masing, dan tidak lagi campur tangan antara daerah pemekaran dengan daerah induk.

Kaho (dalam Sjafrizal 2008:26) menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksananya harus baik
- b. Keuangan harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus cukup dan baik
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Manusia disini adalah masyarakat daerah otonom yang ikut berperan serta dengan baik dalam pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam hal keuangan harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, serta sumber keuangan tersebut secara mandiri. Peralatan atau aset-aset daerah dapat dipenuhi dengan baik untuk membantu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Serta organisasi dan manajemen tugas-tugas yang diberikan dengan bertanggung jawab.

Pertimbangan yang utama perlu dilakukan dalam menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah adalah menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah bersangkutan. Alasannya jelas karena pemekaran suatu daerah tidak dapat berjalan dengan baik jika kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan tidak memadai, paling tidak untuk membiayai tugas-tugas pokok pemerintahan yaitu menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pelayanan publik. Pemekaran daerah tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah diperkirakan nantinya akan mengalami kesulitan dalam mendorong proses pembangunan dan bahkan akan sulit untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara baik. (Blane and Chakery, dalam Sjafrizal, 2008:276).

PAD merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan yang terus diupayakan peningkatannya. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah tersebut merupakan pencerminan dari usaha daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal ini peningkatan pendapatan masyarakat.

Secara khusus pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka dibuat aturan baru untuk menggantikannya. Pada tanggal 15 oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan undang-undang tersebut terdapat definisi otonomi daerah yaitu :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Jadi, otonomi daerah bisa dilakukan apabila daerah yang mengalami otonomi harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut :

“Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Secara formal keinginan ini dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas yang cukup besar. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah

dan politis. Aspek keuangan muncul sebagai akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan Negara untuk daerah yang diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Sjafrizal, 2008:260).

Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai suatu daerah otonom. Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Daerah yang melakukan otonomi bisa dikatakan harus bisa mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak ada campur tangan lagi dari daerah induk.

Pertimbangan yang utama perlu dilakukan dalam menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah adalah menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah bersangkutan. Alasannya karena pemekaran suatu daerah tidak dapat berjalan dengan baik jika kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan tidak memadai. Pemekaran daerah tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah diperkirakan nantinya akan mengalami kesulitan dalam mendorong proses pembangunan dan bahkan akan sulit untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara baik.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu gejala ekonomi dan gejala sosial, pengertian kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar penduduk miskin dan biasanya

dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Todaro (2003:31) mengidentifikasikan kemiskinan sebagai berikut:

Kemiskinan dapat diidentifikasi dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri-ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, rendahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktifitas, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian kemiskinan menurut Basri, (2002:98) adalah kemiskinan diartikan sebagai akibat dari keadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya pendidikan, kredit dan akses pasar.

Jadi berdasarkan pendapat Todaro dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendapatan rendah, tidak berpendidikan, kekurangan gizi, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Dengan keadaan yang demikian seseorang tidak punya kebebasan untuk memilih sehingga tingkat kesejahteraan hidup layak tidak bisa dicapai.

Jhingan (2003:417) mengatakan bahwa untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan dan motivasi untuk maju, maka adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan rakyat. Pada kenyataannya tanpa perbaikan kualitas faktor manusia tidak mungkin ada kemajuan. Jadi, dapat diketahui bahwa negara itu miskin karena memiliki penduduk yang tidak berkualitas. Meskipun dilakukan pembangunan fisik seperti jalan, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya, tetapi manusianya tidak berkualitas modal fisik tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik.

Sen dalam Todaro (2004:22) juga mengatakan bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Berdasarkan pendapat Jhingan dan Sen di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan seseorang terjadi karena tidak adanya kemampuan seseorang untuk mengambil manfaat dari barang-barang komoditi yang dikonsumsi. Hal ini terjadi karena hilangnya hak-hak dasar orang tersebut seperti tidak mendapatkan makanan bergizi, tidak berpendidikan, kurangnya kemampuan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya dan tidak memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Hilangnya hak-hak dasar tersebut mengakibatkan seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan mencapai kebahagiaan hidup.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Soekirno, 2000:10). Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dan diukur dari perkembangan pendapatan daerah (Produk Domestik Bruto) atas harga konstan dari tahun ke tahun.

Menurut Nanga (2001:279) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP), atau pendapatan atau output perkapita.

Output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian bergantung pada kuantitas input yang tersedia, seperti kapital dan tenaga kerja,

produktifitas dari input tersebut. Hubungan diantara output dan input dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y=AF(K,N).....(1)$$

Dimana Y = total output, K = jumlah capital, N = jumlah tenaga kerja dan A = produktifitas (Nanga, 2000:280).

Menurut Kuznets dalam (Todaro, 2004:99), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Masih dalam bukunya, Kuznets dalam (Todaro, 2004:99) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bias ditemui di hampir semua negara yang sedang maju, sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi.
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Masing-masing dari enam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tingginya laju pertumbuhan output daerah yang dicapai adalah hasil dari cepatnya kenaikan produktifitas tenaga kerja. Sementara itu pendapatan daerah yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi daerah yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi perubahan struktur produksi.

Dalam menganalisa permasalahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara atau daerah, terdapat beberapa pandangan dari beberapa ahli ekonomi yang bias diajukan sebagai acuan. Teori-teori pertumbuhan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara telah lama menjadi salah satu pembahasan penting ahli-ahli ekonomi klasik, yaitu pemikir-pemikir ekonomi yang hidup antara akhir abad ke-16 dan ke-17. tokoh-tokoh ekonomi klasik tersebut seperti Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jhon Stuart Mill dan Adam Smith banyak melahirkan pemikiran-pemikiran mereka dalam teori ekonomi.

Namun salah satu ahli ekonomi klasik yang dianggap sebagai pelopor teori ekonomi yang paling terkenal adalah Adam Smith (1729-1790). Dalam bukunya yang terkenal "*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*" (1776), Smith mengemukakan pandangannya mengenai faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Menurut pandangan Smith terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Smith juga menekankan pandangannya pada kebebasan pasar yang seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian. Smith sangat mendukung motto *Laisses Faire* yang

menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah, dimana ia berpendapat pada akhirnya akan ada suatu “tangan tak terlihat” (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut kearah keseimbangan (Deliarnov, 2005:32).

b. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini dikemukakan dalam *Quarterly Journal of Economic* yang diterbitkan pada tahun 1956, dalam tulisan yang berjudul *A Contribution of The Theory of Economic Growth* melihat pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Pandangan ini dapat ditulis secara matematis sebagai berikut (Sukirno, 2004:437)

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat pertumbuhan teknologi

Dalam analisa neo klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lainnya dalam suatu negara. Dengan demikian, pada hakekatnya tidak berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang juga berpendapat bahwa perkembangan faktor-

faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan neo klasik pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independent yaitu teknologi kedalam persamaan pertumbuhan (Todaro, 2003:150). Lebih lanjut teori pertumbuhan ekonomi ini menyatakan bahwa pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui penambahan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (malalui tabungan dan investasi baik investasi dalam negeri maupun asing) serta penyempurnaan teknologi.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Teori Pembangunan Manusia

Menurut Schultz dalam Jhingan (2003:414), ada lima cara pengembangan sumber daya manusia, yaitu : (1) fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; (2) latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; (3) pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (4) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstensi khususnya pada pertanian; (5) migrasi perorangan dan

keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Daftar ini dapat ditambah dengan memasukkan bantuan teknis, keahlian dan konsultan.

Modal fisik menjadi lebih produktif jika negara atau daerah mempunyai modal manusia yang berkualitas. Rens dalam Jhingan (2003) mengatakan bahwa di negara yang mencoba mempercepat pembangunan ekonominya, ditemukan bahwa sekalipun pabrik-pabrik modern dirancang oleh insinyur kelas satu dengan menggunakan metode dan mesin mutakhir dari negara industri yang paling maju, namun volume dan kualitas outputnya terlalu sering tidak memuaskan, karena dalam banyak hal, manajemen dan pekerja tidak cukup terlatih dan kurang pengalaman. Hal tersebut semakin memperjelas pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas disamping modal dalam mencapai tujuan pembangunan.

b. Konsep Pembangunan Manusia

Beberapa kalimat pembuka dari *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programmes* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan manusia yang terpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan.

Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan (UNDP, 2004).

Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal tersebut tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani hidup. Oleh karena itu manusia harus bebas untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya dalam suatu sistem yang berfungsi dengan baik (BPS, Bappenas, UNDP, 2001).

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia; (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini; (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi; dan

(4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Jadi dapat disimpulkan teori pembangunan manusia adalah teori yang memperjelas penting sumberdaya manusia yang berkualitas disamping modal dalam mencapai tujuan pembangunan dan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan.

5. Kemampuan Keuangan Daerah

a. Konsep Kemampuan keuangan Daerah

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167):

- 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169):

- 1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan juga merupakan informasi yang penting terutama untuk

membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah.

b. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, pada tahap awal dimulai dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan:

1) Metode Kuadran.

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PAD_t}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

2) Rata-rata SHARE (%)

Tahap analisis kemampuan keuangan daerah berikutnya adalah dengan cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut :

$$Indeks\ X = \frac{Nilai\ x\ Hasil\ Pengukuran - Nilai\ x\ Kondisi\ Minimum}{Nilai\ x\ Kondisi\ Maksimum - Nilai\ x\ Kondisi\ Minimum}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan :

- X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)
- X_E = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)
- X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

6. Temuan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat/hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut penelitian Ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua”. Dalam studi ini variabel-variabel dependent yang akan dianalisis meliputi pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan penduduk, dan indeks ketimpangan antarwilayah, dimana ketiga variabel tersebut sifatnya kuantitatif. Adapun alat statistik yang digunakan untuk mengujinya adalah *t-test equal mean*. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan pendapatan per kapita. Ada indikasi yang kuat dan

signifikan bahwa pemekaran daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah kota. Secara keseluruhan pemekaran daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Kebijakan pemekaran daerah di Provinsi Papua hanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

Menurut penelitian Fitria Ayu Vidayani (2012) melakukan penelitian berjudul “Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Perkembangan Kota Tangerang Selatan”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dampak dari pemekaran yang dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan telah memenuhi tujuan-tujuan pemekaran dalam hal pembangunan yang tercantum dalam pada PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan peningkatan kinerja keuangan daerah sebagai salah satu bentuk dari percepatan pengelolaan potensi daerah.

Menurut penelitian Ida Ayu Purba Riani (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran di Provinsi Papua”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa berdasarkan analisi tipologi kinerja keuangan daerah terdapat kecenderungan daerah-daerah kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota mempunyai kinerja keuangan daerah yang buruk, yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dari

relatif terisolasi. Perbandingan indeks kinerja keuangan daerah diantara daerah induk, daerah otonom baru dan daerah kontrol, mencakup variabel ketergantungan fiskal dan PAD, rasio PAD terhadap PDRB, dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

Menurut penelitian Rahmadani Yusran (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran Kabupaten Solok Selatan”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Solok Selatan pasca pemekaran telah memperlihatkan adanya perubahan signifikan. Perubahan tersebut terjadi karena kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasana yang memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis menggunakan metode uji t dan variabel kemiskinan, ketimpangan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan keuangan daerah pada penelitiannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis lebih mengkhususkan pada analisis dampak kemiskinan dan ketimpangan pembangunan sebelum dan setelah pemekaran di Kabupaten Solok.

B. Kerangka Pemikiran

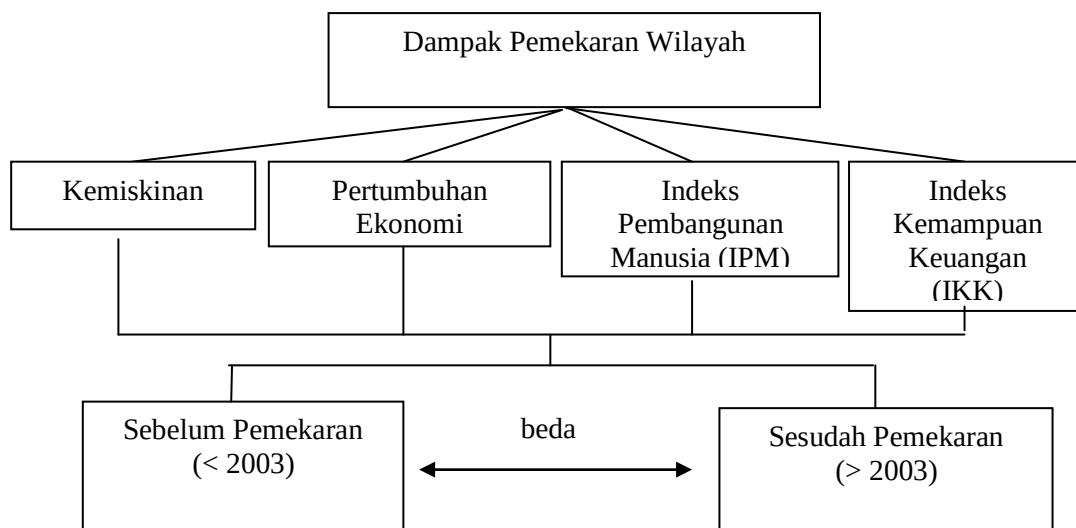
Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau Kabupaten /kota menjadi dua daerah atau lebih. Sementara dalam prakteknya sampai dengan tahun 2008, Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman penggabungan daerah. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian

daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Faktor pemicu pemekaran diantaranya pertumbuhan ekonomi yang pada penelitian ini menggunakan indikator kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang dihitung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemampuan keuangan daerah yang dihitung menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Alasan dilakukannya pemekaran antara lain karena adanya ketimpangan antar wilayah dan kurangnya kualitas SDM di daerah Kabupaten Solok. Jika dilakukan pemekaran apakah kemiskinan akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi, SDM, dan keuangan daerah meningkat. Keadaan di daerah pasca pemekaran lebih membaik. Untuk lebih jelasnya perbedaan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Analisa Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Solok.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

2. Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran.

$$H_0 : \mu_3 = \mu_4$$

$$H_1 : \mu_3 \neq \mu_4$$

3. Terdapat perbedaan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran.

$$H_0 : \mu_5 = \mu_6$$

$$H_1 : \mu_5 \neq \mu_6$$

4. Terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran.

$$H_0 : \mu_7 = \mu_8$$

$$H_1 : \mu_7 \neq \mu_8$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pemekaran wilayah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran tahun 1996-2012 yang di tunjukkan oleh nilai t hitung $0,638 < t$ tabel $2,1604$ dengan $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemekaran wilayah tidak memberikan dampak yang begitu berarti terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok.
2. Pemekaran wilayah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran tahun 1993-2012 yang di tunjukkan oleh nilai t hitung $6,425 > t$ tabel $2,1009$ dengan $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemekaran wilayah yang dilakukan di Kabupaten Solok memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pemekaran wilayah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran tahun 1996-2012 beda yang di tunjukkan oleh nilai t hitung $6,680 > t$ tabel $2,2010$ dengan $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemekaran wilayah yang dilakukan di Kabupaten Solok memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.
4. Pemekaran wilayah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran tahun 1996-2012 yang di tunjukkan oleh nilai t hitung $2,479 > t$ tabel $2,1098$ dengan $\alpha = 0,05$.

B. Saran

1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka diharapkan bagi Pemerintah membuat perencanaan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti, meningkatkan kualitas SDM dari sektor pendidikan dan kesehatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran dalam bidang pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika kualitas SDM meningkat maka pola pikir masyarakat juga lebih baik dan dapat menciptakan lapangan usaha yang bisa mengurangi pengangguran. Langkah selanjutnya yaitu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
2. Kemampuan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam keberhasilan suatu daerah. Daerah dikatakan mandiri jika kemampuan keuangannya tinggi. Maka diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat bersama-sama bisa meningkatkan kemampuan keuangan di Kabupaten Solok dengan cara meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan pemungutan pajak, retribusi daerah dan mengefisienkan cara pemungutannya. Seperti, melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Nyayu Neti & Indra Cahyadinata. 2013. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu*. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu: Bengkulu. Laporan Akhir Kegiatan Perekonomian
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlan
- BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS, 2004. *National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Human Deveploment Index. www.undp.com. Diakses tanggal 12 Januari 2015
- Ilham, Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437
- Jhingan,ML. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jhingan,ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawati, Sandra. 2010. *Pengaruh Pemekaran Provinsi Terhadap Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB : Bandung. Jurnal Ekonomi
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Peratutran Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah